

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN ATASAN  
LANGSUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN  
LALU LINTAS DI DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NAYA RESWITA HARAHAP**

**NPM 1403100075**

**Program Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **NAYA RESWITA HARAHAP**  
N P M : 1403100075  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN LALU LINTAS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

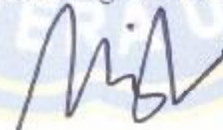
Medan, 15 Maret 2018

Pembimbing



**SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

Plt Dekan,



**Dr. RUDIANTO, M.Si**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **NAYA RESWITA HARAHAP**

N P M : 1403100075

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : 15 Maret 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

  
**Dr. RUDIANTO, M.Si**

Sekretaris,

  
**Drs. ZULEAHMI, M.I.Kom**



## SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya NAYA RESWITA HARAHAP, NPM 1403100075, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.


Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.



Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan

  
Naya Reswita Harahap





Kepercayaan  
Surat ini agar diibukakan  
anggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Naya Reswita Hrp .  
NPM : 1403100075  
Jurusan : IAN  
Judul Skripsi : Efektivitas pengawasan atasan langsung dalam rangka pengelolaan lalu lintas di Dinar Perhubungan Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	6.1.18	- Pada buku belakang hotel gelas pembersihannya	✓
2.	15.1.18	- Perbaiki kata-kata yang rancu dan uraian kronis	✓
3.	30.1.18	- Lengkap deskripsi lokasi penelitian - All Bab I. II. III	✓
4.	20.2.18	- Struktur organisasi, gambar perlu diperbaiki	✓
5.	25.2.18	- Penyajian data yang informatif sesuai kandidat, jenis kelamin dan usia harus ditambahkan pada tabel	✓
6.	1.3.18	- Pertanyaan sesuai dgn kategorisasi - Kesimpulan dan saran pada bab 2 harus sesuai dgn kategorisasi	✓
7.	8.3.18	- Pengubahan daftar pustaka perlu diperbaiki, lampiran DRH, surat lainnya utl kelengkapan skripsi	✓
8.	10.3.18	- All Pemb. Skripsi siap utl diperbahankan	✓

Medan, ...10...03...2018..

Dekan,  
  
Dr. Rudianto, M.Si

Ketua Program Studi,  
  
Nabil Khairiyah, S.P., M.Pd

Pembimbing ke : .I.  
  
Syapriudin, S.Ec., M.H

**ABSTRAK**  
**EFEKTIVITAS PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG DALAM**  
**RANGKA PENGELOLAAN LALU LINTAS DI DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA MEDAN**

**NAYA RESWITA HARAHAP**  
**NPM 1403100099**

Dalam pengawasan atasan langsung serangkaian kegiatan dilakukan oleh atasan yang dianggap memiliki kekuasaan. Setiap atasan atau pimpinan memiliki fungsi yang melekat di dalam jabatannya untuk melaksanakan pekerjaan atau pada personil yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan lalu lintas, Pengawasan Atasan Langsung harus dilakukan secara berkala, yaitu dengan cara pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengawasan atasan langsung dalam rangka pengelolaan lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan atasan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lalu lintas di Kota Medan dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan informan penelitian yang terdiri atas 5 orang, maka dalam penelitian ini akan mewawancarai 5 orang informan penelitian yang terdiri atas ; 3 orang pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan dan 2 orang masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan atasan langsung berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan pimpinan memberikan pembinaan kepada para pegawai serta pimpinan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kinerja dari para petugas dalam mengatur lalu lintas namun walaupun pengawasan sudah dilakukan dengan baik, masih ditemukan hambatan dalam upaya menciptakan pengelolaan sistem lalu lintas yang baik yaitu hambatan yang berasal dari petugas yang mengatur lalu lintas dan dari masyarakat yang tidak taat pada peraturan lalu lintas.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengawasan Atasan Langsung, Lalu Lintas.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya serta nikmat kuasaNya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkaian kata terima kasih juga saya berikan khusus kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang saya sayangi yaitu Ayahanda Nevo Muharram Harahap dan Ibunda Sri Rahayu yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terima kasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata I sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaran ini sekaligus menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah cukup banyak memberikan semangat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami

kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak dan Kasih sayang yang di berikan oleh Allah SWT sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Rudianto, S.Sos,M.Si selaku plt Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M. I Kom, selaku Wakil dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Abrar Adhani S. Sos., M. I Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika S. Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos, M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian skripsi saya.
8. Bapak/IbuDosen yang telah banyak memberikan saya ilmu semenjak awal perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.



9. Ibu dan Bapak Pimpinan Dinas Perhubungan dan staf - staf yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan.
10. Kepada Abang saya Putra Andri Mulya Hrp, Kakak saya Desi Iriani Hsb dan Sahabat-sahabat saya : Cut Mery Rachmanyah, Andrei Wibowo, Nanda Dara Fhonna, Fenni Aulia, Slirin Lidiyana, Atika dan Indry saling berbagi serta selalu memberikan support, bantuan serta motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat saya sebutkan satu per satu.

Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari sepenuhnya sebagai penulis pemula tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Untuk itu penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2018

Penulis

NAYA RESWITA HARAHAHAP

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A    Latar Belakang Masalah.....	1
B    Perumusan Masalah.....	3
C    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1. Tujuan Penelitian .....	3
2. Manfaat Penelitian .....	4
D    Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
A    Efektifitas .....	6
B    Pengawasan Atasan Langsung.....	10
1. Pengertian Pengawasan .....	10
2. Pengertian Pengawasan Atasan Langsung .....	11
C    Pengelolaan.....	15
1. Pengertian Pengelolaan .....	15
2. Tujuan Pengelolaan.....	16
3. Fungsi Pengelolaan .....	17
4. Pengelolaan Yang Baik .....	17
D    Tinjauan Manajemen.....	20
E    Lalu Lintas.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A    Jenis Penelitian... ..	22
B    Kerangka Konsep.....	22
C    Defenisi Konsep.....	24

D	Kategorisasi.....	25
E	Informan Penelitian.....	26
F	Teknik Pengumpulan Data .....	26
G	Teknik Analisa Data .....	27
H	Lokasi Penelitian .....	27
I	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Penyajian Data.....	43
B	Hasil Penelitian.....	44
C	Pembahasan.....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A	Kesimpulan.....	74
B	Saran.....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian.....	23
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	41
Gambar 4.1 Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan.....	42
Gambar 4.2 Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pekerjaan.....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung disebut dengan pengawasan atasan langsung yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Istilah pengawasan atasan langsung atau yang biasa disebut pengawasan melekat (waskat) pertama kali muncul dalam Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengawasan atasan langsung serangkaian kegiatan dilakukan oleh atasan yang dianggap memiliki kekuasaan. Setiap atasan atau pimpinan memiliki



fungsi yang melekat di dalam jabatannya untuk melaksanakan pekerjaan atau pada personil yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pengawasan atasan langsung sangat dibutuhkan pada bidang Lalu Lintas. Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan dan kegiatan yang dilakukan setiap orang. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Kemacetan yang terjadi di beberapa kawasan Kota Medan telah ditangani oleh Dinas Perhubungan, khususnya bidang lalu lintas dengan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Meskipun Dinas Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan tersebut, belum lah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada sehingga Pengawasan Atasan Langsung bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja dan meningkatkan pencapaian dan sasaran pelaksanaan tugas.

Dinas Perhubungan Kota Medan juga telah menggunakan beberapa titik sensor jarak jauh yang disebut *Automatic Traffic Computerize Signal (ATCS)*. ATCS telah ditempatkan di beberapa daerah dan tempat. Hal tersebut merupakan prestasi kerja yang baik dari Dinas Perhubungan karena telah berhasil menciptakan komputerisasi dengan sistem CCTV yang bertujuan untuk memudahkan petugas Dinas Perhubungan dalam memantau setiap daerah yang rawan kemacetan.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan lalu lintas, Pengawasan Atasan Langsung harus dilakukan secara berkala, yaitu dengan cara pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian, untuk menilai suatu kinerja dari organisasi publik tidak cukup hanya melihat dari segi hasilnya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan atasan langsung pada organisasi publik yang memiliki volume kegiatan tinggi seperti halnya Dinas Perhubungan Kota Medan dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan bagaimana cara mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan lingkungan guna mencapai hasil yang maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian adalah **“Bagaimana Efektivitas Pengawasan Atasan Langsung Dalam Rangka Pengelolaan Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan”**.

## **C. Tujuan Dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai sasaran yang akan dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Efektifitas Pengawasan Atasaan Langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Dalam pengelolaan Lalu Lintas di kota Medan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Medan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara subjektif, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan yang berguna bagi instansi terkait.
- c. Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis,logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain, Efektivitas, Pengawasan Atasan Langsung, Pengelolaan Lalu Lintas

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab memuat Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Katagorisasi, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Efektivitas**

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (2003:284), efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *efektive* yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mujarab, dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik, jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja secara efektif. Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai lima macam sumber usaha. Yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan, namun pada umumnya setiap orang dalam melakukan kegiatan tertentu menginginkan suatu hal yang maksimal. Tetapi permasalahan efektivitas bukanlah sederhana pengertian di atas, karena efektivitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena itu ahli memberikan definisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dari pengertian efektivitas.

Menurut Siagian (2002:24) bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih



berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2009: 59).

Sumaryadi (2005:105) mengatakan bahwa efektifitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Begitu juga yang dikemukakan oleh Gie (2000:260) bahwa efektivitas bermanfaat dalam memberikan pelayanan pada orang lain atau kepada organisasi yang menggunakan produknya seperti halnya dengan organisasi yang bersangkutan. Efektifitas memiliki sifat utama bagi organisasi antara lain :

1. Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu.
2. Menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan.
3. Menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dan menjalankan program.
4. Mengikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.

Siagian (2001:151) mengatakan bahwa efektivitas terkait penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau yang direncanakan sebelumnya. Siagian (2001:171) juga mengatakan efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan

berbagai kegiatan. Dari pengertian tersebut terletak empat hal yang terlihat dari efektifitas yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, manfaat, dan hasil.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut (Supriyono, 2000: 29).

Pelaksanaan kegiatan selalu memakai lima macam sumber usaha, yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang, dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis kegiatan, namun pada umumnya setiap masyarakat dalam melakukan kegiatan tertentu menginginkan hasil yang maksimal. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-yujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli di atas efektivitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan sasarannya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang telah dijalankan.

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan (Siagian, 2001:60) antara lain :

1. Faktor waktu

Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.

2. Faktor kecermatan

Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat.

3. Faktor gaya pemberian pelayanan

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara tentang sesuatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan termasuk hal yang tidak terlepas

kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh orang yang bersangkutan.

## **B. Pengawasan Atasan Langsung**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Manullang (2005:173) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan menurut Handoko (2003:359) mengemukakan pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Selanjutnya Mokler yang dikutip oleh Handoko (2003:360) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut : pengawasan manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan

dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112). Sedangkan Ranupandojo (1990 : 6) mendefinisikan pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat.

Kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan tertsebut. Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Pengertian Pengawasan Atasan Langsung**

Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan atasan langsung yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan



evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, digunakan delapan unsur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi/instansi. Delapan unsure pengawasan langsung tersebut adalah :

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses pembentukan organisasi yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan organisasi, dan pelaksanaan fungsi manajerial secara menyeluruh.

2. Pembinaan Personil

Pembinaan personil merupakan upaya menjaga agar faktor sumber daya manusia yang menjalankan sistem dan prosedur instansi pemerintah memiliki kemampuan secara profesional dan moral sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawabnya, yang dilakukan secara terus menerus sejak perekrutan pegawai hingga pensiun.

3. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan oleh manajemen secara tertulis untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi.

#### 4. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses penetapan tujuan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada masa datang.

#### 5. Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian tindakan untuk untuk melaksanakan aktivitas tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

#### 6. Pencatatan

Pencatatan merupakan proses pendokumentasian transaksi/kejadian secara sistematis yang relevan dengan kepentingan organisasi instansi. Pencatatan juga mencakup proses pengelolaan data yang diperoleh menjadi informasi dalam bentuk keluaran olahan data atau laporan.

#### 7. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi ( pemberi tugas ) atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan.

Beberapa fungsi pengawasan melekat antara lain :

- a. Meningkatkan disiplin, prestasi dan perkembangan pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas.
- b. Tertib pengelolaan keuangan
- c. Tertib pengelolaan perlengkapan
- d. Tertib pengelolaan kepegawaian
- e. Tercapainya sasaran pelaksanaan tugas.

- f. Dapat terciptanya keteraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas
- g. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- h. Dapat menurunnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme
- i. Dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang antara lain diukur dari menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada instansi yang bersangkutan, serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut. Hal tersebut antara lain dapat diperoleh dari laporan hasil pengawasan.
- j. Dapat mengurangi kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, antara lain diukur dari menurunnya kasus penyimpangan yang terjadi serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut serta terjadinya peningkatan kehematan, efisiensi dan efektifitas.
- k. Cepatnya penyelesaian perijinan, diukur dari tertib tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tujuan Pengawasan Atasan Langsung sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah diperintahkan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam pekerjaan atau bekerja.
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektif atau efisien.

- e. Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan.

## **C. Pengelolaan**

### **1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002:695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Manulang (1990:4) mengatakan pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

## **2. Tujuan Pengelolaan**

Afifuddin (2010 : 3) Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.



### **3. Fungsi Pengelolaan**

Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

### **4. Pengelolaan yang Baik**

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerjadan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota.

Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30) adalah :

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis.
- d. Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 43) adalah :

- a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
- b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
- d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut Terry (2006 : 364) adalah :

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan

- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

#### **D. Tinjauan Manajemen**

Millet dalam Sukarna, (2011: 2), menyatakan *Management Is The Process Oif Directing And Facilitating The Work Of People In Formal Group To Achieve A Desired End*. (Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).

Manajemen menurut Hasibuan dalam Torang, (2013: 165) adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan pendapat diatas, Miller dalam Torang (2013:166) menyatakan bahwa manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan bagi orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Selain itu, Terry dalam Sukarna (2011:3), juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predeteminde objectives through the efforts of other 11 people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan

keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesu ksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik. Berdasarkan pengertian diatas, menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan Manajemen adalah ilmu mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai.

### **E. Lalu Lintas**

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Menurut Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

1. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan
2. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda

4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :

- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.  
Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.
- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.  
Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

## **BAB III**

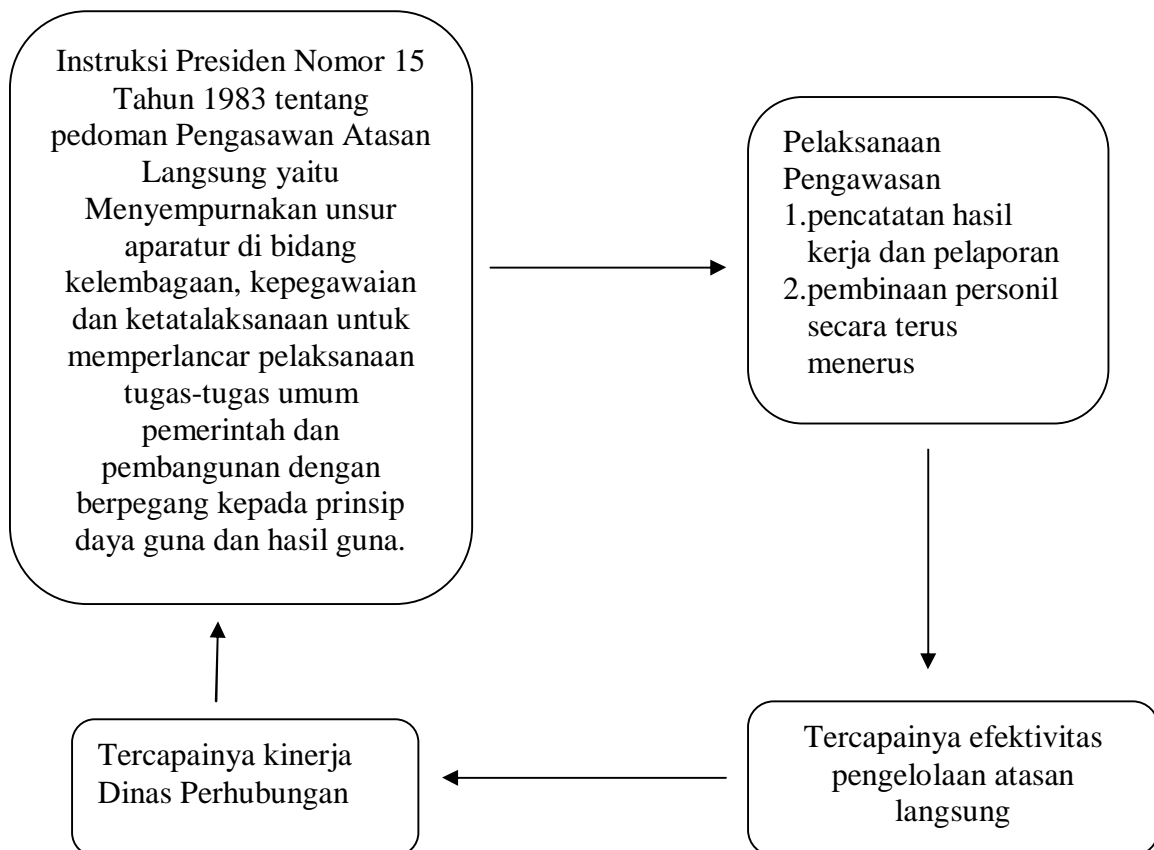
### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif menghendaki suatu informan dalam bentuk deskripsi dan lebih menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut. Menurut Zuriah (2006:47) penelitian dengan menggunakan metode deskripsi adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian – kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis.

#### **B. Kerangka Konsep**

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pengawasan Atasan Langsung Dalam Rangka Pengelolaan Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut :



**Gambar 3.1. Kerangka Konsep**

### C. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Menurut Irawan dalam Bagong (2005:49) konsep adalah makna yang berada di alam pikiran atau di dunia kepaahaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:



1. Efektivitas adalah menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.
2. Pengawasan Atasan langsung adalah suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
4. Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.

#### **D. Kategorisasi**

Adapun katatorisasi dari Efektivitas Pengelolaan Atasan Langsung Dalam Rangka Pengelolaan Perparkiran Di Dinas Perhubungan Kota Medan:

1. Fungsi Pengawasan
2. Faktor penghambat Pengawasan Atasan Langsung
3. Pembinaan personil secara berkala
4. Adanya penilaian hasil kerja pengelolaan Lalu Lintas

## **E. Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto. 2005: 171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

Informan Kunci (*key informan*), adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Adapun informan kunci tersebut adalah:

1. Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan).
2. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas.
3. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan Wawancara mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan. Metode wawancara ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan.

## **2. Data Skunder**

Melalui studi Keputusan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diperoleh dari referensi beberapa buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh menggunakan data skunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Moleong (2007:247), teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.

## **H. Lokasi Penelitian dan Jadwal penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dan penelitian dilakukan pada bulan Februari s/d Maret 2018.

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak,

Tionghoa, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman.

Kota Medan adalah ibukota dari Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis terletak di garis 3°35'LU - 3,583°LU dan 98°40' BT – 98,667° BT dengan Luas wilayah 265,10 Km<sup>2</sup> (26.510 Hektare) yang merupakan 3,6 % dari total keseluruhan luas wilayah daerah Sumatera Utara ([www.pemkomedan.go.id/](http://www.pemkomedan.go.id/) diakses pada tanggal 24 Juni 2015 Pukul 21:43 WIB). Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli serdang di bagian barat dan timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Letak yang strategis inilah yang menyebabkan kota Medan relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Di samping itu sebagai daerah pinggir jalur pelayaran Selat Malaka, kota Medan juga memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun internasional (ekspor-impor).

Kota Medan memiliki 21 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan

Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Belawan, dan Kecamatan Medan Kompas serta terdiri dari 151 Kelurahan.

### **1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan**

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada dibawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyerahan Sebagian Wewenang Pemerintah Pusat Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2015 merupakan rencana tahun kedua pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan 2014-2018. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2014- 2018, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Medan pada tahun 2015. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2015 berisi kebijakan pembangunan perhubungan, yaitu transportasi dan kegiatan pendukungnya, yang akan dibiayai baik melalui APBD dan APBN Uraian ini

akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan perkiraan tahun 2020.

## **2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan**

Adapun visi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah untuk meningkatkan sistem gerakan/aktivitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan.

Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pemerintah, masyarakat dan swasta) sebagai pilar pelaku utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan.
- c. Peningkatan kualitas sistem gerakan/aktifitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.

## **3. Tugas Pokok dari Dinas Perhubungan Kota Medan**

Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Medan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain tugas di atas, Dinas Perhubungan Kota Medan juga memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. Fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu :**

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program bidang perhubungan.
- c. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan udara serta pos dan telekomunikasi.
- d. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### **5. Deskripsi Tugas Jabatan di Dinas Perhubungan Kota Medan**

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasikan hasil kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Medan



yaitu dalam bidang perhubungan lalu lintas dan angkutan darat, perhubungan laut dan udara, parkir dan teknik sarana dan prasarana angkutan darat untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan tugas pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris Kepala Dinas bertugas untuk merencanakan, menyusun, mendistribusikan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan melaporkan lingkup Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum bertugas merencanakan, membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk, menyiapkan, mengkonsep dan melaporkan lingkup Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan. Selain itu juga bertugas melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyiapkan, mengkonsep, menilai, mengoreksi dan melaporkan lingkup Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

e. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program bertugas merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyiapkan, mengkonsep, mengendalikan,

melaporkan, dan melaksanakan lingkup Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

f. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat bertugas merencanakan, menyusun, mendistribusikan, mengoordinasikan, member petunjuk, mengendalikan, menyelenggarakan, membuat laporan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan dan petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan.

g. Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri

Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri bertugas merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan melaksanakan tugas kedinasan lainnya lingkup seksi pengembangan teknik perbengkelan dan karoseri sesuai ketentuan perundang-undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

h. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor bertugas merencanakan, membagi tugas, menyusun, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup teknik pengujian kendaraan bermotor. Selain itu juga bertugas melakukan pembinaan kepada

kepada seluruh staf seksi Pengembangan Pengujian Dinas Perhubungan Kota Medan.

i. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal

Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal bertugas merencanakan, membagi tugas, menyusun, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk atasan dan peraturanyang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup pengembangan teknik terminal.

j. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat bertugas merencanakan, mendistribusikan, mengoordinasikan, memberi petunjuk, menyusun, melaksanakan, mengendalikan, menyelenggarakan, membuat laporan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan dan petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas Bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan KotaMedan.

k. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertugas merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya lingkup Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan perundang undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

l. Kepala Seksi Angkutan Darat

Kepala Seksi Angkutan Darat bertugas untuk merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan

tugas kedinasan lain lingkup Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

m. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban bertugas merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas kedinasan lain lingkup Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk optimalisasi kegiatan kedinasan.

n. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara bertugas merencanakan, menyusun, mendistribusikan, mengoordinasikan, memberi petunjuk, melaksanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, membuat laporan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan arahan dan petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup bidang perhubungan laut dan udara.

o. Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan

Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian lingkup Kepelabuhan dan kebandarudaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan, yaitu merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengkonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan.

p. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut bertugas merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku. Tujuan jabatan merencanakan program kerja di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

q. Kepala Seksi Penunjang Pelayaran

Kepala Seksi Penunjang Pelayaran bertugas melaksanakan sebagian tugas pada bidang perhubungan laut yakni merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup seksi penunjang keselamatan pelayaran.

r. Kepala Bidang Perparkiran

Kepala Bidang Perparkiran bertugas merencanakan, menyusun, mendistribusikan, mengoordinasikan, memberi petunjuk, melaksanakan menyelenggarakan, mengendalikan, membuat laporan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan dan petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas Bidang Perparkiran.

s. Kepala Seksi Parkir Khusus

Kepala Seksi Parkir Khusus bertugas merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengonsep, mengendalikan dan melaksanakan pelayanan di bidang perparkiran khusus sesuai petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup parkir khusus.

t. Kepala Seksi Parkir Harian (Wilayah I)

Kepala Seksi Parkir Harian (Wilayah I) bertugas merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengkonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan tugas pelayanan dibidang perparkiran Harian (Wilayah I) sesuai petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup parkir Harian (Wilayah I).

u. Kepala Seksi Parkir Harian (Wilayah II)

Kepala Seksi Parkir Harian (Wilayah II) bertugas merencanakan, membagi tugas, menyiapkan, mengkonsep, mengendalikan, melaporkan dan melaksanakan pelayanan dibidang perparkiran Harian (Wilayah II) sesuai petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas lingkup parkir Harian (Wilayah II).

v. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A melaksanakan sebagian kegiatan Dinas di bidang pengelolaan Terminal Penumpang antara lain :

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas/pekerjaan yang diberikan Kepala Dinas baik melalui perintah lisan maupun secara tertulis dan melaporkannya kembali kepada Kepala Dinas,
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh asset Pemerintah Kota Medan yang ada di UPT Terminal serta perawatannya.

w. Kepala Unit Pelaksana (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Medan, menyelenggarakan secara

rutin speksi atau pun pengujian kendaraan terhadap kendaraan bermotor, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan Kegiatan Teknis Penunjang, dan melaksanakan sebagian kegiatan Dinas di bidang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

## **6. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan**

Untuk memperlancar dan mengatur pelaksanaan tugasnya, kantor Dinas Perhubungan Kota Medan juga membuat struktur organisasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik dan garis komando yang jelas antara pimpinan dengan bawahan. Dengan adanya struktur organisasi ini maka pembagian tugas dan fungsi masing-masing bagian menjadi lebih jelas sehingga memudahkan pengawasan pekerjaan karena memberikan penjelasan tentang batasan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian.

Dinas Perhubungan Kota Medan saat ini dijalankan oleh unsur Pejabat Struktural dan Staf ditambah Pegawai Honorer guna mendukung tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Walikota Medan. Struktur organisasi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan adalah bentuk organisasi garis di mana bentuk tersebut menggunakan sistem koordinasi mengalir dari pimpinan ke bawahan secara langsung. Pihak bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan atas pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

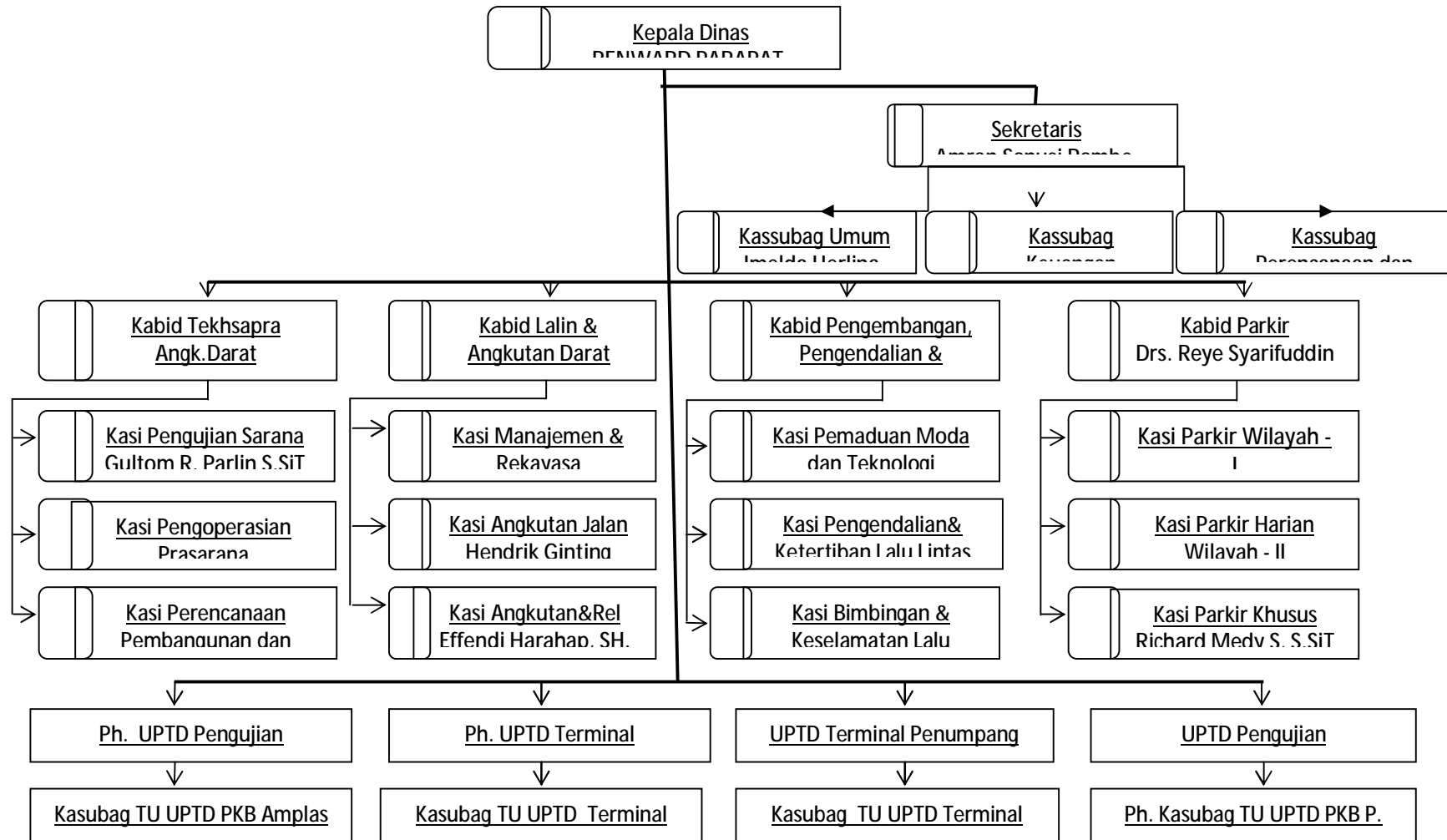
Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Sub Bagian Umum
- d. Kepala Sub Bagian keuangan
- e. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
- f. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat
- g. Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri
- h. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal
- j. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat
- k. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- l. Kepala Seksi Angkutan Darat
- m. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban
- n. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara
- o. Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan
- p. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- q. Kepala Seksi Penunjang Pelayaran
- r. Kepala Bidang Perparkiran
- s. Kepala Seksi Parkir Khusus
- t. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I)



- u. Kepala Seksi Parkir harian Tepi Jalan (Wilayah II)
  - v. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A
  - w. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
- (sumber : repositoryusu.ac.id)

**Gambar 3.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Efektivitas Pengawasan Atasan Langsung Dalam Rangka Pengelolaan Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri atas 3 orang pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan dan 2 orang masyarakat.

**Tabel 4.1**

#### **Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Jabatan/ Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40 %
2	Honor	1	20%
3	Wiraswasta	2	40%
<b>Jumlah</b>		<b>5 orang</b>	<b>100%</b>

Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari

rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari foto yang diambil pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jabatan/ Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	SMP	0	0%
2	SMA	0	0%
3	S1	4	80%
4	S2	1	20%
<b>Jumlah</b>		<b>5 orang</b>	<b>100%</b>

## **B. Hasil Penelitian**

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan - pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan peneliti. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber, penulis mengamati keadaan dan situasi yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Pengawasan

Dalam suatu instansi pemerintahan terciptanya efektivitas kerja seorang pegawai ditentukan oleh banyak faktor seperti iklim kerja, fasilitas kerja, motivasi kerja serta beban kerja. Selain faktor-faktor tersebut dalam menciptakan efektivitas kerja pegawai juga diperlukan adanya faktor pengawasan kepada pegawai, karena pengawasan berfungsi mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dari suatu instansi pemerintahan. Pengawasan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, karena pelaksanaan pengawasan dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efektifitas kerja pegawai, dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan penelitian yaitu Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) mengenai pengawasan yang dilakukan kepada pegawai dan diperoleh hasil sebagai berikut :

“Pengawasan merupakan hal penting ya dalam upaya penciptaan kinerja dan efektifitas kinerja. Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lalu lintas dan dalam pelaksanaannya berhubungan pula dengan dinas-dinas terkait. Pengawasan disini dimaksudkan untuk mengontrol kinerja pegawai di lapangan agar tetap sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengawasan ini pula dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu pengelolaan lalu lintas. Pimpinan turun ke lapangan melihat langsung seperti apa kinerja dari para pegawai di lapangan”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya saya mewawancarai Bapak Suryono (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan sebagai berikut :

“Saya selaku pimpinan yang bertanggung jawab langsung tentang baik tidaknya lalu lintas di Kota Medan tentu memiliki keinginan untuk menciptakan pengelolaan lalu lintas yang baik dan teratur. Untuk mencapai hal tersebut tentu saya tidak dapat bergantung dengan bawahan saja tetapi saya juga wajib turun langsung mengamati dan mengontrol jalannya lalu lintas di Kota Medan. Dengan kata lain saya mengawasi kinerja pegawai dalam menjalankan tugas di lapangan. Pengawasan ini saya lakukan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pegawai karena yang namanya pegawai kan manusia sehingga terkadang karena keterbatasan yang dimiliki sulit untuk mengelola lalu lintas yang memiliki permasalahan yang kompleks”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Sebagus apapun rencana kerja yang telah ditentukan lalu tersedianya personil yang handal yang mampu melaksanakan tugasnya namun faktor pengawasan tetap saja memegang peran yang sangat penting. Peneliti mewawancarai Bapak Rudi Saut Sitorus S.E (Laki-Laki, 40 Tahun) selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan tentu memiliki fungsi yang positif bagi upaya penciptaan kinerja yang baik dari pegawai. Pengawasan yang berjalan dengan baik akan mengurangi dan mencegah kesalahan dari pegawai. Saya merasa pegawai pun merasa senang dengan adanya pengawasan kerja jadi mereka pun jadi semangat bekerjanya karena dapat dinilai langsung oleh atasan baik atau buruk kinerja yang ditunjukkan”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 11.30 WIB)

Selanjutnya saya kembali bertanya kepada Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) mengenai manfaat dari pengawasan yang dilakukan oleh atasan/pengawasan langsung dan beliau mengatakan sebagai berikut :

“Dalam upaya penciptaan kinerja yang maksimal dari para pegawai diperlukan adanya pengawasan dari pimpinan kepada bawahan. Pengawasan yang dilakukan

berguna untuk memastikan bahwa para pegawai bekerja secara maksimal dan tidak menyalahgunakan wewenangnya terutama dalam melaksanakan tugas mengatur jalannya lalu lintas agar rapi dan tidak semrawut”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Senada dengan pertanyaan diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suryono (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :

“Saya rasa pengawasan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh atasan karena hal ini berhubungan dengan kinerja yang ditunjukkan oleh bawahannya. Pengawasan dipandang sebagai pencegahan dari terciptanya kesalahan yang mungkin dilakukan oleh bawahan. Selain manfaat dari pengawasan yang dilakukan atasan untuk memastikan bahwa kinerja yang ditunjukkan para pegawai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan dan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna lalu lintas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama saya bertanya kepada Bapak Rudi Saut Sitorus S.E selaku Kepala Seksi Pengendalian (Laki-Laki, 40 Tahun) dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :



“Pengawasan sangat bermanfaat seperti yang saya utarakan tadi bahwa dengan adanya pengawasan yang baik dapat mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para pegawai dalam mengatur lalu lintas. Dengan adanya pengawasan pula para pegawai yang ingin bermalas-malasan menjadi berpikir ulang karena tingkah lakunya di lapangan diawasi oleh atasan”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 11.30 WIB)

Pengawasan merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah di setiap instansi dan satuan organisasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu dan kinerja di dalam lingkungan kerjanya masing-masing agar tujuan instansi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan mengenai pelaksanaan pengawasan atasan langsung yang diberikan kepada pegawai dan diperoleh hasil yaitu :

“Dalam melaksanakan suatu pengawasan harus adanya suatu standar yang telah yang telah ditetapkan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan sehingga bentuk dari pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan selaras dengan apa yang diinginkan sebelumnya. Standar tersebut penting untuk mengukur bagus tidaknya kinerja yang ditunjukkan oleh para pegawai dalam mengelola lalu lintas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai pertanyaan yang sama kepada Bapak Suryono (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :

“Saya rasa sudah cukup baik ya karena atasan sering turun ke lapangan untuk melihat seperti apa kinerja dari masing-masing pegawai. Selain itu atasan juga menerima masukan dan saran dari para pegawai mengenai permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan pengelolaan lalu lintas. Atasan langsung dapat menilai kinerja dari masing-masing pegawai yang tentu sangat berguna bagi terciptanya kinerja maksimal dari Dinas Perhubungan Kota Medan”

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Dalam pelaksanaan pelayanan public dalam hal pengelolaan lalu lintas, petugas di lapangan merupakan salah satu unsure penting dalam terciptanya sistem lalu lintas yang teratur. Terciptanya lalu lintas yang teratur sangat diharapkan oleh masyarakat terutama dalam menunjang kegiatan sehari-hari dari masyarakat. Dalam hal ini saya melakukan pula wawancara dengan masyarakat dan bertanya tentang sudah baikkah pengelolaan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Hendra Nasution (Laki-Laki, 37 Tahun) dan ia mengatakan yakni :

“Menurut saya belum ya karena bisa kita lihat sama-sama bahwa sistem lalu lintas di Kota Medan tidak tertata dengan baik. Banyaknya titik-titik kemacetan yang mengganggu mobilisasi masyarakat yang ingin beraktifitas. Kemacetan dirasa memang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal salah satunya yaitu kelakuan masyarakat di jalan raya yang menyebabkan terjadinya kemacetan akan tetapi personil perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan mengenai sikap dan perilaku masyarakat agar teratur dan sabar saat menghadapi kemacetan bukan malah sudah tahu macet malah melawan arah”.

(Hasil wawancara pada hari Jum'at 23 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Hasil sebaliknya diperoleh saat peneliti bertanya kepada Bapak Ahmad Faisal (Laki-Laki, 39 Tahun) dan beliau mengatakan yaitu :

”Saya menilai sudah cukup baik sih walaupun ada di beberapa tempat yang mengalami permasalahan. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu masalah penting yang harus dicari jalan keluarnya karena arus lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan-gangguan ini akan berdampak negatif pada masyarakat. Salah satu masalahnya tentang kemacetan. Kemacetan disebabkan oleh terbatasnya ruas jalan dan mobil yang beredar yang sangat banyak sehingga sulit menghindari terjadinya macet di Kota Medan”.

(Hasil wawancara pada hari Jum'at 23 Februari 2018, pukul 10.00 WIB)

Persepsi yang muncul dari masyarakat hendaknya dijadikan salah satu pedoman bagi instansi pemerintah dalam upaya peningkatan kinerjanya terutama dalam pengelolaan lalu lintas di Kota Medan.

## 2. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan tersebut tentu tidak lepas dari permasalahan dan hambatan yang mengganggu kinerja dari para pegawai. Berdasarkan hal tersebut saya melakukan wawancara dengan Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan mengenai apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pengelolaan Lalu Lintas dan beliau mengatakan bahwa :

“Dalam proses pelayanan public tentu saja ada saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya dalam hal ini dalam pengelolaan lalu lintas, salah satu faktor penghambat yang muncul adalah luasnya area kerja yang harus di cover oleh pihak Dinas Perhubungan dan luas area yang sedemikian besar tidak sesuai dengan banyaknya personil yang tersedia untuk mengelola lalu lintas di kota medan, Kota Medan ini memiliki luas yang cukup besar sehingga luas area kerja dengan terbatasnya jumlah personil mempengaruhi pengelolaan lalu lintas di Kota

Medan. Selain itu tingkat kejujuran dan disiplin personil juga salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan lalu lintas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Senada dengan pertanyaan diatas, saya bertanya kepada Bapak Suryono (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :

“Tidak dapat di pungkiri yang kami sering kali menghadapi kendala yang cukup berat dan hal tersebut menghambat pengelolaan lalu lintas yang baik salah satu faktor penghambatnya yaitu jumlah volume kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahun sedangkan prasarana penunjang lonjakan kendaraan bermotor dapat dikatakan kurang layak terutama dalam sarana dan prasarana lalu lintas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Selanjutnya saya bertanya pula dengan Bapak Rudi Saut Sitorus S.E (Laki-Laki, 40 Tahun) selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :

“Hambatan dalam pengelolaan lalu lintas ya ada yang dari dalam Dinas Perhubungan ada pula dari masyarakat ya. Kalau dari Dinas Perhubungan yaitu

kurangnya personil di lapangan dalam mengatur lalu lintas dan ada pula petugas yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, kalau dari masyarakat yakni kelakuan masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor yang tidak taat aturan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas yang telah ditentukan”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 11.30 WIB)

Dalam menghadapi hambatan dalam pengelolaan lalu lintas, pihak terkait perlu mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti bertanya kepada informan yakni Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan mengenai usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengatasi hal tersebut dan diperoleh hasil yaitu :

“Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lalu lintas di Kota Medan tentu memiliki upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan lalu lintas. Kami membentuk SPT monitoring kepada komandan regu, dengan cara turun langsung ke lapangan, bantuan HT, Walkie Talkie, Smartphone juga salah satu usaha dari pemantauan, dengan melakukan video call untuk memastikan apakah personil benar-benar berada ditempat”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya saya bertanya kepada Bapak Suryono (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa :

“Cara kami mengatasinya yaitu dengan manajemen rekayasa lalu lintas atau pengalihan arus, memperbanyak CCTV lalu lintas, memperbanyak rambu-rambu lalu lintas, meningkatkan mutu SDM personil lalu lintas serta melakukan sosialisasi mengenai kampanye penggunaan angkutan public untuk kegiatan sehari-hari karena hal ini dipandang efektif dalam menekan mobilisasi kendaraan bermotor terutama pada jam-jam sibuk”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Kemudian saya bertanya tentang pertanyaan yang sama kepada Bapak Rudi Saut Sitorus S.E (Laki-Laki, 40 Tahun) selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau menyampaikan :

“Salah satu fungsi pengawasan yang kami lakukan ya ini untuk mengetahui permasalahan di lapangan dan setelah tahu masalah jadi bisa mencari upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Dan usaha yang Dinas Perhubungan lakukan yakni dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, meningkatkan kualitas personil yang bertugas di lapangan dan memperbanyak rambu-rambu lalu lintas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 11.30 WIB)

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan lalu lintas harus mampu diatasi oleh Dinas Perhubungan jika masalah tersebut tidak mampu diatasi tentu akan menciptakan masalah baru bagi Dinas Perhubungan Kota Medan. Peneliti bertanya mengenai dampak dari permasalahan yang tidak dapat diatasi, hasil wawancara dengan Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu :

“Tentu jika permasalahan yang dihadapi oleh pihak Dishub tidak dapat diselesaikan dengan baik tentu akan mengganggu kelancaran lalu lintas di Kota Medan dan kalau kelancaran lalu lintas terganggu pasti akan member dampak bagi kehidupan masyarakat. Selain itu kalau tidak teratasi otomatis tugas yang telah dilakukan tidak sesuai dengan SPT yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kerugian negara”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Senada dengan hasil wawancara diatas, Bapak Suryono (Laki-Laki, 40 Tahun) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :

“Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang sulit dicari penyelesaiannya karena mau bagaimanapun kalau tidak ada penambahan sarana dalam hal ini ruas jalan yang tersedia terbatas akan terus ditemukan permasalahan



dalam pengelolaan lalu lintas salah satunya kemacetan. Dan apabila permasalahan ini tidak dapat teratasi akan terjadi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan lalu lintas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak Ahmad Faisal (Laki-Laki, 31 Tahun) mengenai permasalahan yang menghambat terciptanya pengelolaan lalu lintas yang baik dan diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Menurut saya masalah yang menghambat dalam pengelolaan lalu lintas salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat berada di jalan raya. Masyarakat sering kali sesuka hatinya saja saat berkendara di jalan raya, sikap dan perilaku seperti ini tentu tidak baik dilakukan di jalan raya karena dapat mengganggu kepentingan orang lain”.

(Hasil wawancara pada hari Jum’at 23 Februari 2018, pukul 10.00 WIB)

Senada dengan Bapak Ahmad Faisal, Bapak Hendra Nasution (Laki-Laki, 31 Tahun) mengatakan bahwa :

“Saya rasa kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lalu lintas yaitu banyak masyarakat yang tidak taat peraturan saat sedang berkendara di jalan raya mulai dari melawan arah terus putar arah tidak pada tempatnya tentu

ini membuat lalu lintas menjadi semrawut dan tidak teratur. Selain itu kinerja dari petugas dalam mengelola lalu lintas juga kurang maksimal dan sering kita temukan petugas di lapangan hanya sekedar berdiri tanpa ada upaya untuk mengawasi lalu lintas. Petugas harusnya berperan aktif dalam mengelola lalu lintas agar tercipta sistem pengelolaan yang baik”.

(Hasil wawancara pada hari Jum’at 23 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Ketertiban serta kelancaran dalam berlalu-lintas merupakan dambaan semua pihak, akan tetapi fakta di lapangan hal ini sulit untuk diwujudkan karena untuk terciptanya harapan tersebut harus didukung oleh berbagai faktor yang mempunyai peran sangat menentukan. Fungsi lalu-lintas bukan hanya menjadi pekerjaan dan tanggungjawab daripada Dinas Perhubungan, akan tetapi tugas di bidang lalu-lintas tersebut pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab dari semua pihak terutama instansi terkait dan seluruh masyarakat pengguna jalan.

### 3. Pembinaan Personil Secara Berkala

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu keharusan bagi organisasi/intansi karena penempatan pegawai secara langsung dalam pekerjaan tidak menjamin mereka akan berhasil. Pegawai sering merasa tidak pasti tentang peranan dan tanggung jawab mereka di dalam suatu instansi pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi seorang pegawai untuk dapat lebih menguasai dengan baik sehingga mampu menciptakan kinerja

yang maksimal. Berikut peneliti bertanya mengenai berapa kali pembinaan personil/pegawai dilakukan dan hasil wawancara dengan Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu :

“Saya rasa penting melakukan pembinaan ataupun pengarahan kepada bawahan agar bawahan mengerti akan fungsi dan tugasnya serta timbul rasa tanggung jawab dari para pegawai sehingga terciptalah kinerja yang baik dalam pengelolaan lalu lintas di Kota Medan. Pembinaan dilakukan 2 kali yaitu apel pagi dan apel sore”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Senada dengan hasil wawancara diatas, Bapak Suryono (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa :

“Sehari dua kali yakni pagi dan sore, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai pengelolaan lalu lintas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Selanjutnya saya bertanya tentang pertanyaan yang sama dengan Bapak Rudi Saut Sitorus S.E (Laki-Laki, 40 Tahun) selaku Kepala Seksi Pengendalian

dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :

“Pembinaan personil dilakukan pada saat apel yakni satu hari dua kali pada saat apel pagi dan apel sore”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 11.30 WIB)

Kemudian saya bertanya mengenai proses pembinaan yang dilakukan dan Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa :

“Selain apel kami juga melakukan pengecekan apabila salah satu personil ada yang tidak melakukan tugasnya, pengecekan absen atau kehadiran. Sanksi yang dilakukan adalah SP yaitu SP 1,2,3 apabila personil tidak jera maka dilakukan pemberhentian secara tegas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan Bapak Suryono (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan Bapak Rudi Saut Sitorus S.E selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan, diperoleh hasil wawancara yang senada diantara keduanya yaitu :

“Kami melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk melihat kinerja dari para pegawai dan dengan HT, ATCS pengawasan terhadap pegawai dilakukan ataupun dengan melihat absensi dan melakukan pembinaan melalui apel”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Tujuan diselenggarakan pembinaan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja dari para pegawai guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan pemahaman pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kemudian saya melakukan wawancara dengan Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S (Laki-Laki, 39 Tahun) selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan mengenai hasil pembinaan personil yang dilakukan dan beliau mengatakan bahwa :

“Dalam setiap pembinaan yang dilakukan tentu pihak Dishub mengharapkan output atau hasil yang baik sehingga mampu menunjang terciptanya efektifitas pengelolaan lalu lintas. Selain itu upaya pembinaan diharapkan mampu meningkatnya kualitas personil karena kami mengadakan pelatihan/diklat. 3 kali per tahun untuk tingkat Pusat dan 1 kali per tahun untuk tingkat Pemko Medan”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Kemudian saya mewawancarai Bapak Rudi Saut Sitorus S.E (Laki-Laki, 40 Tahun) selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan bahwa :

“Melalui pembinaan diharapkan kinerja para pegawai menjadi lebih baik. Dengan dilakukannya pemantauan dan pembinaan maka personil/pegawai menjadi lebih terarah, amanah, bertanggungjawab dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya, sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan tugas sesuai SPT yang telah ditentukan”

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 11.30 WIB)

Selanjutnya peneliti bertanya kepada masyarakat mengenai fasilitas yang tersedia sudah cukup untuk menunjang terciptanya pengelolaan lalu lintas yang baik dan hasil wawancara dengan Bapak Hendra Nasution diperoleh hasil yakni :

“Saya rasa fasilitas penunjang seperti jalan, lampu lalu lintas dan rambu lalu lintas belum sesuai seperti yang diharapkan. Seperti kondisi jalan yang kurang layak digunakan serta terbatasnya jalan sehingga saat kendaraan sedang banyak mengakibatkan macet di lokasi tersebut. belum lagi ketersediaan fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas masih jauh dari harapan, banyak lampu lalu lintas yang rusak dan banyak rambu lalu lintas yang hilang karena dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab”.

(Hasil wawancara pada hari Jum'at 23 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Senada dengan hasil wawancara diatas, Bapak Ahmad Faisal (Laki-Laki, 31 Tahun) mengatakan bahwa :

“Fasilitas merupakan elemen penting dalam menunjang kelancaran lalu lintas, fasilitas penunjang seperti tersedianya jalan raya yang memadai, lampu lalu lintas dan kelengkapan rambu lalu lintas. Saya menilai ketersediaan fasilitas pendukung dalam pengelolaan lalu lintas belum maksimal karena masih banyak kekurangan yang ada di lapangan mulai dari lampu lalu lintas yang mati dan rambu lalu lintas yang jarang sekali terlihat. Kedua hal tersebut penting karena kalau lampu lalu lintas mati tentu akan membuat lalu lintas menjadi semrawut karena tidak ada aturan yang mengatur sistem lalu lintas sedangkan petugas jarang terlihat di tempat”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.00 WIB)

#### 4. Adanya Penilaian Hasil Kerja

Penilaian kerja pegawai merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas hasil kerja dari para pegawai. Salah satu cara untuk mencapai tujuan instansi pemerintahan adalah dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Berbagai cara dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan

mengenai cara mengevaluasi hasil pengelolaan lalu lintas dan beliau menyampaikan yaitu :

”Selain melalui SKP (sasaran kinerja pegawai), pimpinan sering melaksanakan rapat kecil dengan bawahannya untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dalam kinerja yang ditunjukkan pegawai dalam hal ini saat menjalankan tugas dan fungsinya yaitu mengelola lalu lintas agar lalu lintas lancar dan tidak muncul kemacetan”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Kemudian saya melakukan wawancara dengan Bapak Suryono selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan hasilnya sebagai berikut :

“Caranya dengan melihat kemacetan di jam-jam padat, mengecek rambu-rambu lalulintas yang tersedia, disiplin kerja personil dan melihat kehadiran personil dengan kehadiran yang tepat waktu”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Senada dengan hasil wawancara diatas, Rudi Saut Sitorus S.E selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa :



“Saya mencari tahu permasalahan yang ada kemudian mendiskusikannya dengan bawahan. Selain itu saya sering melakukan rapat kecil guna mencari cara agar tercipta kinerja yang baik dan pengelolaan lalu lintas yang baik pula”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 11.30 WIB)

Selanjutnya saya bertanya mengenai upaya yang dilakukan atasan dalam meningkatkan kinerja dari bawahannya dan Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan menyampaikan sebagai berikut :

”Sebagai atasan saya selalu berupaya memberikan masukan serta motivasi kepada bawahan saya untuk mampu memberikan hasil kerja yang maksimal selain itu saya selalu mengawasi kinerja dari para pegawai agar tidak ada pegawai yang melakukan kesalahan atau menyalahgunakan tugas dan fungsinya dalam mengelola lalu lintas di Kota Medan”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Suryono selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau mengatakan yaitu :

”Melakukan pengawasan langsung kepada para personil selain itu membeikan motivasi kerja agar personil menjadi semangat dan termotivasi dalam melaksanakan pengelolaan lalulintas. Lalu melakukan pengawasan dan

pengendalian lalu lintas diruas-ruas persimpangan jalan, dan pos- pos pengawasan pengendalian yang ada di dalam kota”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Selanjutnya saya bertanya mengenai Kinerja Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lalu lintas kepada Bapak Edison Brase Hamonangan Sagala S.S selaku Kabid PP&K (Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan) Dinas Perhubungan Kota Medan dan beliau menyampaikan sebagai berikut :

”Sebagai aparat pemerintah yang wajib memberikan kinerja terbaik terutama dalam memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan dibidang lalu lintas dengan baik. Saya menilai bahwa kinerja Dinas Perhubungan terutama dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola lalu lintas tergolong cukup baik, hal ini dapat kita lihat dari makin tanggapnya para pegawai dalam mengawasi lalu lintas di jalan-jalan yang ada di Kota Medan. Dalam proses pengelolaan lalu lintas masih ada saja yang kurang salah satunya tentang kemacetan yang sering terjadi di Kota Medan namun hal ini bukan melulu kesalahan dari pegawai Dinas Perhubungan”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Senada dengan hasil wawancara diatas, Bapak Suryono selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan Bapak Rudi Saut Sitorus

S.E selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan menyampaikan hal yang sama yaitu :

”Kinerja Dinas Perhubungan tanpa batas waktu, dalam arti yaitu kehadiran tidak terduga tergantung kebutuhan. Saya menilai bahwa sejauh ini kami telah memberikan kinerja semaksimal mungkin agar masyarakat merasa nyaman saat beraktifitas dengan menggunakan jalan raya dan tidak harus menghadapi kesemrawutan lalu lintas”.

(Hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018, pukul 10.25 WIB)

Kinerja suatu instansi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kinerja sumber daya manusia yang ada pada instansi tersebut. Arti penting dari sumber daya manusia terletak pada kemampuannya untuk bekerja dengan maksimal dan positif terhadap sasaran pelaksanaan pekerjaan serta kemampuan yang diperoleh untuk mencapai hasil kerja yang maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi dan prestasi kerja yang optimal untuk membantu pencapaian tujuan dari instansi tersebut.

### **C. Pembahasan**

Pada bagian ini, dari hasil penyajian data yang peneliti peroleh dari lapangan akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian dan juga

melakukan pengamatan-pengamatan atau observasi terhadap fenomena yang ada terkait dengan masalah serta keadaan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Efektivitas Pengawasan Atasan Langsung Dalam Rangka Pengelolaan Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis paparkan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan.

Dalam upaya penciptaan kinerja maksimal dari pegawai, organisasi mesti memahami apa-apa saja yang menjadi elemen penting dalam penciptaan kinerja maksimal dari para pegawai. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu instansi tidak akan mampu memberikan hasil yang maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas yang baik. Kualitas dari sumber daya manusia dalam suatu instansi perlu diperhatikan karena bagaimana suatu instansi ingin memperoleh kinerja yang maksimal dari para pegawai jika instansi tersebut tidak melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan kemampuan kerja yang dicapai dan diinginkan dari pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja bisa menjadi sarana bagi suatu instansi untuk mengukur kemampuan para pegawainya. Dan salah satu upaya untuk mengontrol dan meningkatkan kinerja pegawai yakni dengan pengawasan. Peran dari pengawasan yaitu untuk mengetahui kekeliruan atau kesalahan secepat mungkin dalam pelaksanaan pengelolaan lalu lintas sehingga akan dapat diketahui diawal, hal ini untuk

memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap kesalahan atau penyimpangan yang muncul dalam diri pegawai..

Adanya tindakan pengawasan akan membantu pimpinan dalam mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana. Selain itu, pengawasan dilaksanakan untuk menemukan kelemahan dan kesalahan yang harus dibetulkan dan mencegah agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa untuk memberlakukan pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dilakukan secara obyektif bukan subyektif. Pengawasan juga bukan sekedar mencari-cari kesalahan pegawai tetapi pengawasan yang dilakukan untuk membimbing, mendidik pegawai. Karena pengawasan yang dilakukan secara subyektif hanya akan menimbulkan efektivitas yang semu, jadi pegawai akan berlaku baik ketika dilihat saja dan akan melakukan hal yang berbeda dibelakang pimpinan.

Pengawasan merupakan salah satu upaya yang berfungsi untuk mengontrol kinerja yang pegawai tunjukkan baik saat di kantor maupun di luar kantor. Pengawasan penting sebagai salah satu upaya untuk memperoleh hasil kerja dari para pegawai secara maksimal. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pengawasan melalui pimpinan yang ada di dalamnya atau biasa disebut dengan pengawasan atasan langsung. Manullang (2005 : 173) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut, pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan rencana semula. Pengawasan terhadap para pegawai yang berjalan baik akan mengurangi tingkat kesalahan dan rasa malas dari para pegawai sehingga efektivitas pengelolaan lalu lintas dapat tercapai semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pihak pimpinan Dinas Perhubungan dituntut untuk dapat menciptakan pengawasan yang baik. Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan rasa nyaman dan semangat kerja dari dalam diri pegawai dan secara tidak langsung akan memberikan efek positif dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas di Kota Medan. Pengawasan wajib dilakukan karena manusia tidak ada yang sempurna disamping mempunyai kelebihan, manusia juga mempunyai kekurangan, dengan maksud untuk mencegah dan mendeteksi sedini mungkin, bila ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, guna diambil tindakan- tindakan yang tepat dan cepat.

Dalam hal ini tentang pengelolaan lalu lintas, baik buruknya pengelolaan lalu lintas tidak lepas pula dari peran pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk mengarahkan dan mengatur para bawahannya agar bekerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan pimpinan hendaknya bukan sekedar mencari-cari kesalahan dan kelalaian para pegawai, melainkan dengan pengawasan diharapkan apabila ada kesalahan dapat diketahui secepat mungkin agar dapat dicari seseera mungkin jalan keluar untuk mengatasinya dan menghindari kesalahan dan mendapatkan arahan dari atasannya terkait pengelolaan lalu lintas di Kota Medan. Dengan pengawasan yang baik akan meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas.

Atasan memberikan masukan dan pembinaan yang bertujuan untuk membekali para petugas pengatur lalu lintas agar mampu mengatasi masalah yang muncul di lapangan. Pada Dinas Perhubungan Kota Medan dilakukan pembinaan kepada para petugas lapangan sebanyak dua kali yaitu pada saat apel pagi dan apel sore. Pembinaan ini efektif memberikan manfaat positif bagi para petugas dalam menjalankan tugasnya mengelola sistem lalu lintas di Kota Medan. Pembinaan merupakan cara yang dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai yang di miliki oleh Dinas Perhubungan merupakan petugas yang siap melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik karena memiliki kompetensi dalam bekerja yang cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan di Dinas Perhubungan sudah dilakukan akan tetapi masih ditemukan kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan. Pihak Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pengawasan kepada pegawainya dengan harapan jika pengawasan berjalan dengan baik tentu akan memberi dampak positif dalam pengelolaan lalu lintas. Kendala yang dihadapi oleh pimpinan pada saat melakukan pengawasan yaitu terbatasnya atasan dalam mengawasi karena luasnya wilayah Kota Medan sehingga atasan sulit untuk setiap hari melakukan control kepada pegawai yang ada di lapangan. Dalam melaksanakan pengawasan tentu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bahkan frekuensinya perlu dilakukan sesering mungkin untuk dapat mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pimpinan. Dan pimpinan memiliki tugas yang tidak sedikit bukan hanya mengawasi pegawainya

saja namun banyak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lalu lintas, salah satu permasalahan yang sering kali di hadapi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan yakni kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa hal mulai dari ketidakseimbangan antara kepemilikan kendaraan bermotor dan pertumbuhan jalan yang tersedia serta kapasitas ruas jalan yang terbatas untuk menghadapi peningkatan kendaraan bermotor. Selain itu ada pula hambatan yang muncul dari pengguna jalan raya yaitu sering kali terkait dengan adanya aktivitas sosial dan ekonomi (pasar atau pedagang kaki lima), selanjutnya ketidakberesan pengurusan perparkiran juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan kemacetan di Kota Medan. Adanya kendaraan bermotor yang parkir di badan jalan yang terjadi karena adanya pertokoan yang tidak menyediakan tempat parkir serta lalu lalang orang untuk menyeberang yang menyebabkan kapasitas jalan menjadi tidak cukup. Dengan kondisi yang demikian, dapat dipastikan akan terjadi kepadatan kendaraan yang berlebihan pada jalan-jalan di Kota Medan.

Selain itu ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai dirasa belum baik, misalnya banyak ditemukan jalan yang berlubang yang bisa membahayakan lalu rambu-rambu lalu lintas kurang merata sebarannya sehingga banyak pengguna jalan raya yang tidak tahu. Upaya pencegahan dilakukan melalui upaya peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan termasuk pengawasan di bidang lalu lintas. Dengan terbatasnya fasilitas tentu membuat beban dan tanggung jawab pegawai Dinas Perhubungan



menjadi lebih besar sedangkan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki keterbatasan anggota atau petugas lapangan dalam mengelola lalu lintas di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh atasan sudah cukup baik namun tetap saja ditemukan permasalahan dalam pengawasan pegawai. Untuk itu perlu dicari jalan keluar dari permasalahan yang muncul terutama yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan lalu lintas. Dalam meningkatkan efektifitas pengawasan pengelolaan lalu lintas, seorang pimpinan harus bisa bersikap tegas terhadap para pegawai serta bersikap professional dalam menjalankan pekerjaan. Pimpinan tidak boleh membedakan antara pegawai yang diawasinya semua harus diperlakukan dengan adil. Selanjutnya atasan/pimpinan lebih banyak meluangkan waktu untuk mengawasi pegawainya terutama pada saat sedang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Pimpinan pun harus memberikan waktu bagi para pegawai merasa diperhatikan oleh atasan dan hal ini tentu akan memberi efek positif bagi pimpinan maupun Dinas Perhubungan Kota Medan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan memberikan manfaat bagi para pegawai, dengan adanya pengawasan yang kontinyu dapat meminimalisir kesalahan dari para pegawai baik yang di sengaja ataupun tidak
2. Pelaksanaan pengawasan atasan langsung berjalan dengan cukup baik yakni pimpinan memberikan pembinaan kepada para pegawai serta pimpinan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kinerja dari para petugas dalam mengatur lalu lintas.
3. Masih ditemukan hambatan dalam upaya menciptakan pengelolaan sistem lalu lintas yang baik.
4. Penilaian hasil kerja melalui SKP (sasaran kinerja pegawai), untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dalam kinerja yang ditunjukkan pegawai dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Efektivitas Pengawasan Atasan Langsung Dalam Rangka Pengelolaan Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pimpinan perlu menyediakan waktu dan tenaga lebih untuk melaksanakan pengawasan.
2. Pengawasan perlu ditingkatkan ke depannya karena dengan adanya pengawasan kinerja dari para pegawai menjadi lebih mudah di control dan di evaluasi.
3. Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan lalu lintas perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana agar masyarakat mengetahui peraturan yang berlaku di jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. **Manajemen Pemerintahan Daerah**. Graha Ilmu. Makassar.
- Afifuddin. 2010. **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Bagong, Suyanto. 2005. **Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gie, The Liang. 2000. **Administrasi Perkantoran Modern**. Singapura: Pustaka Nasional pte.Ltd.
- Handoko, T.Hani, 2003, **Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia**,. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Laksmi, dkk. 2008. **Manajemen Perkantoran Modern**. Jakarta: Penaku.
- Manullang, 2005. **Dasar\_Dasar Manajemen** . Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Ranupandojo, Heidjrahman, 1990, **Manajemen Personalia**, Edisi Keempat, Yogyakarta : BPFE.
- R.Terry, George. 2006. **Prinsip- Prinsip Manajemen**. Jakarta: Bumi Aksara
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**. Jakarta: Modern English Press.
- Sedarmayanti.2009. **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2001, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, S. P. 2002. **Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja**. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. 2003. **Teori dan Praktek Kepemimpinan** (cetakan kelima). Jakarta: Rineka Cipta.

- Sobri, dkk. 2009, **Pengelolaan Pendidikan**, Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Sukarna. 2011. **Dasar-Dasar Manajemen**. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. **Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**. Jakarta: Citra Utama.
- Supriyono, 2000. **Sistem Pengendalian Manajemen**, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Torang, Syamsir. 2013. **Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)**. Bandung: Alfabeta.
- Zuriah, Nurul. 2006. **Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan**. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sumber Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Naya Reswita Harahap  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 05 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Bangsa : Indonesia  
Alamat : Binjai, Km.12 Jl. Pembangunan, Ladang Baru  
Gg. Ronda  
Anak Ke- : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara  
Nama Orangtua  
Ayah : Nevo Muharram Harahap  
Ibu : Sri Rahayu S  
Pendidikan  
1. SD Budi Setia Medan : Tahun 2001 - 2007  
2. SMP Panca Budi Medan : Tahun 2007 – 2010  
3. SMK Panca Budi Medan : Tahun 2010 – 2013  
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tahun 2014 – 2018

Medan, Maret 2018

Penulis

NAYA RESWITA HARAHAP

1403100075